

**PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERDESAAN (PNPM-MPD) DI KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2012**

Tegar Nian

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAN

Email : tegar_nian@yahoo.co.id

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan program untuk mengatasi masalah partisipasi masyarakat miskin dalam Implementasi PNPM-MPd yang telah dilaksanakan di Kecamatan Teluk Keramat. Permasalahan mengenai partisipasi masyarakat miskin yang terjadi di daerah Kecamatan Teluk Keramat cukup menarik untuk diteliti mengingat masih banyaknya terdapat masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam Implementasi PNPM-MPd. Melalui penulisan skripsi ini juga dimaksudkan, agar proses Implementasi PNPM-Mp dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari sebuah program yang mengacu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat miskin, sehingga masyarakat miskin dapat terbantu dalam hal kesempatan kerja. Pelaksanaan PNPM-MPd di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif dengan teknik pengolahan data analisis kualitatif. Penelitian ini mencakup 3 hal dalam melakukan penelitian yaitu Pengorganisasian, Interpretasi dan aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Implementasi PNPM-Mp di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas masih belum berhasil. Hal tersebut dikarenakan faktor penghambat yaitu kualitas sumber daya manusia yang tidak merata dalam proses pelaksanaan tersebut dan ketidak patuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan yaitu mengutamakan masyarakat miskin.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, PNPM Mandiri Perdesaan.

Abstract

The aim of this research is to given an understanding about the implementation to resolve the problems of the low poor participation in implementation of PNPM-MPd that have been implemented in District Teluk Keramat. The problems about the low poor participation that have been happened in District Teluk Keramat was give anxiety to investigate that many people who are less participates in the implementation of PNPM-PMd. The purpose of this research also to make the process of the implementation of PNPM-PMd can be happen according the purpose of a program that refers to increasing of the low poor participation ,until the poor can be helped in terms of employment opportunities. The implementation of PNPM-MPd in District Teluk Keramat Regency Sambas. The research method used is descriptive with the technique of data qualitative analysis. This study includes three terms in conduct of the research that are organizing , interpretation and application. The results showed that implementation of PNPM-PMd in District Teluk Keramat Regency Sambas is not maximized. That is because the inhibiting factor of the quality of human resources is uneven and disobedience to established procedures of prioritize of the poor.

Keywords: implementation , policy, PNPM-MPd

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran yang cukup kompleks. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan kemiskinan dan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan kerja bagi angkatan kerja di perdesaan oleh sebab itu upaya untuk menanggulangi kemiskinan harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan dan pengkapasitasan.

Oleh karena itu adanya suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu bagaimana pemerintah itu sendiri dapat mengambil suatu langkah dalam menyikapi masalah yang sedang terjadi di suatu lingkungan masyarakat dalam melakukan sebuah kebijakan yang dapat mengatasi suatu persoalan mengenai masalah kemiskinan. Dan karena itu pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Dalam kegiatan ini dirumuskan mengenai mekanisme pelibatan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga masyarakat bukan lagi sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan, dalam Program PNPM mandiri perdesaan bukanlah hanya berkisar pada individu yang miskin tapi program PNPM juga menganggarkan untuk infrastruktur seperti jalan desa dan program fisik lainnya agar akses masyarakat bisa lebih mudah dan dapat terjangkau dengan baik. Dengan adanya program PNPM, diharapkan individu miskin mempunyai kekuatan dalam memberdayakan kehidupan mereka. Dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaan.

Dasar hukum pelaksanaan Mandiri Perdesaan mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang akan disusun disini penulis menggunakan Surat Penetapan Kepala Desa Nomor : 29.B Tahun 2012 Tentang Penetapan Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Berdasarkan dari dasara hukum pelaksanaan PNPM-MPd yang digunakan terdapat adanya masalah dalam proses pelaksanaan PNPM-MPd yaitu tidak adanya laporan pertanggung jawaban dan rincian dana yang telah digunakan di papan informasi dan rendahnya partisipasi masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam pelaksanaan PNPM-MPd tahun 2012.

Dalam uraian masalah yang telah diuraikan sebelumnya, bagi peneliti ada hal yang menjadi fokus penelitian serta menarik untuk diteliti yaitu proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2012 terutama di bidang pembangunan infrastruktur Kecamatan Teluk Keramat Kabupten Sambas. Perumusan masalah disajikan dengan maksud untuk memperjelas sasaran yang terdapat dalam penelitian ini, khususnya agar penelitian ini tidak menyimpang dari sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka dari itu perumusan masalah ini adalah Bagaimana proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2012 di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Tahun 2012. Disamping tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian

ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat mengenai implementasi PNPM-MPd baik secara teoritis maupun praktis. Secara Teoritis Sebagai bahan perbandingan dan informasi awal bagi peneliti lain yang hendak mengkaji baik dari segi pengembangan konsep maupun teori implementasi serta bisa dijadikan bahan bacaan atau referensi, sehingga penelitian ini diharapkan dapat juga menambah Pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya pada implementasi kebijakan PNPM-MPd. Secara Praktis Sebagai bahan masukan dan kontribusi pemikiran kepada implementor PNPM-MPd di Kecamatan Teluk Keramat dan masyarakat serta kepada semua pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan kinerja implementor PNPM-MPd dalam bentuk kebutuhan pembangunan infrastruktur masyarakat serta dapat diaplikasikan sesuai dengan prosedur dan kebutuhan yang ada di masyarakat.

KAJIAN TEORI

Implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi “macam kertas” bila tidak berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor agar kebijakan publik yang dimaksud benar-benar berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan harapan yang diinginkan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan publik merupakan upaya untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Implementasi pada dasarnya merupakan pengejaan keputusan mengenai kebijakan mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan pengadilan. Idealnya, keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan

tujuan yang hendak dicapai, dan dalam berbagai cara menggambarkan struktur proses implementasi tersebut.

Proses implementasi kebijakan dimulai dengan keluaran kebijakan dari organisasi, kemudian menuju kepada kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan. Sehingga hasilnya terlihat melalui perbaikan mendasar terhadap peraturan yang telah atau belum dilaksanakan, yang berguna untuk menilai kinerja implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan dilakukan penilaian terhadap keberhasilannya, apakah telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki atau belum, untuk itu perlu dilihat kinerja dari kebijakan tersebut. Adapun konsep kinerja kebijakan sentiasa diartikan sebagai apa yang dilihat dari program yang telah dilaksanakan. Hal ini menyangkut seluruh aspek yang berhubungan dengan kebijakan yang telah diimplementasikan.

Jones (1996:166) mengatakan bahwa: Implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoprasikan sebuah program, dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Menurut Jones ketiga aktivitas tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan. Tiga aktivitas dimaksud adalah Pengorganisasian, yaitu menyangkut pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan. Pengorganisasian disini adalah birokrasi sebagai alat pembaharuan yang melaksanakan tujuan-tujuan pembangunan sosial, ekonomi di mana pemerintah harus mempunyai pranata yang mudah menerima inovasi baru bermanfaat bagi pembangunan. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Di samping itu interpretasi juga dapat diartikan sebagai penafsiran dalam memahami apa yang terjadi pada setiap tahapan dalam pembuatan kebijakan. Aplikasi (penerapan), yaitu

ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan program atau penerpan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lain yaitu sebuah proses yang rumit karena berhubungan dengan kebijakan lainnya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka teori Jones yang menjadikan dasar dalam penelitian ini, karena seperangkat kegiatan yang akan dilakukan dengan penggunaan sumber-sumber daya yang terjadi dan menghasilkan manfaat dan memiliki karakteristik dalam pelaksanaan program yang harus mempunyai batasan yang jelas serta sasaran yang dapat diukur dan dapat dipergunakan sebagai alternatif untuk mempertimbangkan setiap kegiatan dalam pencapaian sasaran, khususnya program PNPM-MP.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang implementasi adalah *Risama Agistiasari (2012)*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan menyatakan bahwa proses Implementasi masih belum berhasil karena dalam pelaksanaannya masyarakat masih bingung dalam melaksanakan kegiatan tersebut karena keawaman masyarakat tentang maksud dan tujuan program dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan yang sehingga menyebabkan ketidakpedulian masyarakat tentang program.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subyek penelitian secara apa adanya (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain). Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Nawawi (1991:62) yang mengatakan bahwa: “jenis penelitian deskriptif analisis adalah suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan

keadaan subjek atau objek yang diteliti baik berupa orang, lembaga, masyarakat pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”. Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Dengan pertimbangan penulis ingin mengetahui proses implementasi PNPM-MPd dan tersedianya data yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penelitian.

Menurut Moleong (2004:132) “suatu kajian dalam penelitian kualitatif justru telah mengisyaratkan di tetapkannya *Purposive* yaitu peneliti menentukan sendiri orang-orang yang hendak di jadikan subjek satuan kajian penelitian kualitatif/berkelompok”. Untuk memperoleh sumber data primer digunakan teknik wawancara dan observasi. Adapun subjek yang menjadi sasaran yang di pilih penulis antara lain: TPK dan masyarakat miskin yang menerima bantuan dari PNPM-MPd. Alasan penulis memilih mereka sebagai informan adalah karena para informan tersebut adalah juru kunci atau orang-orang yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah dilapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu teknik observasi, teknik wawancara. dan teknik dokumentasi. Untuk itu disusun alat pengumpulan data berupa pedoman obserasi, merupakan suatu daftar (objek) yang akan diamati dan disesuaikan dengan tujuan penelitian, pedoman wawancara yaitu berupa catatan dan pertanyaan mengenai pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada informan, dengan alat bantu berupa buku catatan dan tape recorder, dokumentasi merupakan suatu langkah yang digunakan peneliti dengan mengumpulkan data-data penting berupa, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis menurut Purwoko, (1999:39) yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek penelitian. Dapat digambarkan dalam tahap-tahap seperti reduksi data, pengorganisasian data, dan interpretasi data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Di mana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2004:330).

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES IMPLEMENTASI PNPM-MPd TAHUN 2012

Dalam implementasi sebuah kebijakan, para ahli mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi proses implementasi sebuah kebijakan. Dari kumpulan faktor tersebut bisa kita tarik benang merah faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik. yang disimpulkan dari hasil telah para akademisi yang meneliti berbagai kasus kegagalan implementasi. Faktor-faktor tersebut adalah tipe-tipe kebijakan yang berdasarkan tujuan dan metodenya dapat menjadi faktor pembatas dalam implementasi. Selain itu karena nyaris tidak ada kebijakan yang hanya dilaksanakan oleh agen/lembaga tunggal, maka faktor-faktor yang berkaitan dengan aktor-aktor pembuat dan pelaksana kebijakan, serta pola hubungan kerja horizontal dan vertikal antar aktor dan antar instansi akan mempengaruhi tingkat kesulitan implementasi.

1. Pengorganisasian Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2012

Setiap organisasi memiliki susunan organisasi yang berfungsi untuk memudahkan serta memahami jabatan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi. Untuk organisasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas sendiri terdiri 6 Jabatan diikuti tugas masing-masing jabatan Berdasarkan struktur organisasi guna kelancaran dalam melaksanakan tugas maka secara internal keorganisasian telah ditetapkan pembagian tugas karena akan mempengaruhi besar atau kecilnya hasil pelaksanaan dalam sebuah pengorganisasian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan tercapai dan terlaksanakan secara konsisten dengan prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan. Sehingga pengorganisasian PNPM Mandiri Perdesaan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai pelaku pelaksana.

dalam organisasi diketahui dari penempatan tugas dan posisi organisasi masih sangat kurang yang dimana diketahui ada beberapa posisi dalam organisasi masih tidak ada hal itu dapat membuat kelemahan dalam pondasi organisasi dan dapat diketahui posisi-posisi penting untuk meninjau pelaksanaan PNPM-MPd atau untuk membantu dalam pembuatan hasil laporan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan hal itu kondisi pembangunan infrastruktur jalan sangat tidak terurus dimana tidak ada tahap evaluasi oleh masyarakat karena sangat dibutuhkan peran penting untuk merawat jalan karena anggaran yang telah d alokasikan untuk tahap evaluasi tidak dilaksanakan sehingga kondisi jalan banyak yang rusak dan tidak ada tahap perbaikan oleh masyarakat dan dana tersebut tidak efektif seharusnya dengan mengalokasikan dana untuk tahap evaluasi sangat memerankan peran penting dalam pemantauan kondisi jalan yang rusak tetapi hal

itu berbanding terbalik dengan harapan agar jalan tersebut masih dalam keadaan normal.

2. Interpretasi Para Implementor Terhadap Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Teluk Keramat.

Pemahaman berbagai dari pihak terhadap suatu kebijakan sangat penting. Terutama pemahaman yang baik oleh para implementor terhadap suatu kebijakan karena merekalah yang akan menyampaikan tujuan utama dari suatu kebijakan tersebut. Dengan pemahaman yang baik demikian diharapkan kebijakan yang dilaksanakan bisa mencapai goals yang diinginkan. pada dasarnya program ini ingin membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan kesempatan kerja, tetapi terdapat masyarakat, terutama masyarakat miskin yang kurang peduli dan kurang mengerti maksud dan tujuan dari PNMP Mandiri Perdesaan disebabkan masyarakat miskin ada yang tidak mengikuti sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan, sehingga masyarakat miskin kurang mengerti maksud dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan dan masyarakat miskin pun dirugikan dalam hal meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan karena pengambilan keputusan dan pengelolaan tidak sepenuhnya masyarakat miskin dikarenakan keawaman masyarakat tentang sebuah program. Sehingga belum terealisasi dengan baik tentang sasaran dari PNPM Mandiri Perdesaan sehingga tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan kurang berhasil karena yang seharusnya masyarakat miskin yang meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja kepada masyarakat miskin tidak terealisasi dengan baik. Bahkan yang bukan termasuk masyarakat miskin yang mendapatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja tersebut.

Sebenarnya dengan interpretasi yang sudah tepat terhadap tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan oleh implementor TPK maka akan membantu terwujudnya implementasi program ini dengan baik namun sayangnya belum diikuti prosedur-prosedur pelaksanaan kepada sasaran PNPM Mandiri Perdesaan.

3. Penerapan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Keramat Tahun 2012

Penerapan merupakan tindakan nyata dalam implementasi suatu program dilapangan disertai aturan-aturan main dalam program yang dijalankan. Dalam penerapan mencakupi rutin dari kegiatan, maupun partisipasi dan lainnya sebagainya, terkait suatu program yang dijalankan. Berikut akan dijelaskan mengenai Aplikasi/Penerapan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Keramat. Dalam pelaksanaan kegiatan program PNPM Mandiri Perdesaan yaitu ada dua program kegiatan yang di danai atas usulan dari masyarakat yaitu pada bidang fisik seperti infrastruktur, kemudian dana yang diterima berdasarkan langsung dari kantor pembedaharaan keuangan (KPKN) terus disalurkan melalui rekening UPK Kecamatan Teluk Keramat kemudian dana tersebut di berikan kepada TPK yang digunakan untuk membangun desa berdasarkan usulan yang diprioritaskan kepada setiap desa tersebut.

secara kuantitas masyarakat yang ikut rapat sangat minim sekali, karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap Program PNPM-MPd masih dikatakan cukup rendah dan hal ini dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat masih banyak yang hanya tamat SD dan hanya dalam jumlah kecil saja masyarakat yang berpendidikan yang dimana hal ini menyulitkan kan sebagai TPK untuk mengkoordinir masyarakat agar melaksanakan PNPM-MPd karena sebelumnya masyarakat yang ikut Musyawrah desa sangat sedikit, hal ini juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan PNPM-MPd sehingga menyebabkan

pelaksanaan program dilapang tidak tepat waktu.

Dengan pembuat kebijakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap hasil yang akan dicapai. Dalam mengimpelentasikan sebuah kebijakan merupakan suatu proses dari sebuah komunikasi yang baik syarat utama bagi kebijakan tersebut supaya dapat di implementasikan harus dengan komunikasi yang jelas, akurat, dan konsisten antara pelaku kebijakan. Untuk menghindari kesalah pahaman antara pembuat kebijakan dan implementorya sehingga dalam perintah-perintah implementasi terjadi penolakan implementor terhadap keputusan yang ada. Oleh karena itu perlu adanya pengenalan terlebih dahulu terhadap program kegiatan yang ingin dilaksanakan. Untuk mensosialisasikan program kebijakan komunikasi dapat dilakukan dengan cara melalui komunikasi pendekatan individu. Sehingga dapat lebih intersif untuk menyampaikan ide-ide atau gagasan sehingga dapat menimbulkan pemahaman dari masyarakat terhadap program PNPM Mandiri Perdesaan oleh masyarakat setempat seperti yang diharapkan. Dengan melalui komunikasi yang baik akan dapat menarik simpati masyarakat sehingga berpotensi untuk menarik minat seseorang untuk mengambil bagian dalam merealisasikan suatu program kebijakan. Dalam proses pelaksanaan sosialisasi yang disampaikan harus sejalan serta dapat dipahami oleh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan hal ini dapat membingungkan bagi pihak pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dalam melaksanakan program kebijakan tersebut sehingga akan terjadi tidak tercapainya sasaran yang diharapkan.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dilapangan maka di peroleh kesimpulan mengenai Pengorganisasian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Tegar Nian

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Teluk Keramat terdiri dari pelaku PNPM yang harus di tingkatkan mengingat masih ada yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan terutama peran dan tanggung jawab dari pelaku PNPM seperti BKAD, BP-UPK, UPK, TP, TV, TP2. Interpretasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Teluk Keramat, beberapa poin penting adalah pelaku PNPM harus mengacu pada tujuan-tujuan PNPM yang dimana tujuan PNPM untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama masyarakat miskin dalam mengambil keputusan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Disini masyarakat miskin di pinggirkan dalam hal pelaksanaan, sehingga masih banyak masarakat miskin masih belum terbantu dalam mendapatkan kesempatan kerja. Penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Teluk Keramat, dari segi penerapan PNPM masyarakat masih bingung dalam melaksanakan kegiatan tersebut karena keawaman masyarakat tentang maksud dan tujuan program dan kurangnya SDM pada TPK yang menyebabkan tidak maksimalnya mengkoordinasi masyarakat agar mau ikut berpartisipasi pelaksanaan PNPM.

REFERENSI

- Moleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University.
- Jones, Charles O. 1996. *An Interduction to the Study of the Study of Public Policy North Scrituate Massachussets: Dux Bury Press*.

Purwoko, Bambang. 1999. *Diklat Mata Kuliah Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta : FISIP Universitas Gajah Mada.

Undang-Undang Republik Indonesia No: 25/KEP?MENKO/KESRA/VII/2007 tentang pedoman umum PNPM

Surat Penetapan Kepala Desa Nomor : 29.B Tahun 2012 Tentang Penetapan Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Risama Agistiasari (2012) Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak Periode Tahun 2010-2011

